

Pengaruh Temuan Audit BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2018

Andi Sayyidatun Ufairah Anto¹, Andi Kusumawati², Nirwana³

^{1,2,3} Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Hasanuddin
e-mail: sayyidatunufairah@gmail.com¹, andiuma88@gmail.com²,
nirwana_ni@yahoo.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi selatan tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan 24 sampel yang telah diperoleh dari kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan IHPS dan LKPD tahun 2013-2016. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan Uji statistic deskriptif, Uji asumsi klasik, Uji regresi linier berganda dan Uji Hipotesis Koefisien Determinasi R dan Uji t. Berdasarkan hasil Analisis Regresi Linier Berganda menunjukkan pada Temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah, sedangkan Tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: Audit, Kinerja, Pemerintah, Tindak Lanjut

Abstract

This study aims to determine the effect of audit findings and follow-up on the results of the examination on the performance of the district/city government of South Sulawesi Province in 2016-2018. This study used purposive sampling with 24 samples that had been obtained from districts/cities in South Sulawesi Province. The data sources in this study used IHPS and LKPD in 2013-2016. In this study, the tests were carried out with descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple linear regression tests and the coefficient of determination hypothesis testing R and t tests. Based on the results of the Multiple Linear Regression Analysis, the audit findings have a positive and significant effect on government performance, while the follow-up examination results have a negative and significant effect on government performance. This research has a significant influence on the performance of local governments.

Keywords : *Audit, Performance, Government, Follow Up*

PENDAHULUAN

Berdasarkan pelaksanaa otomoni daerah dalam pasal 1 Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi.

Pada saat melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini untuk mengelompokkan Laporan Keuangan mana saja yang telah memiliki informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Jenis Opini yang diberikan oleh BPK untuk Laporan Keuangan yang telah diperiksanya adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar) serta TMP (Tidak Memberikan Pendapat/*Disclaimer*).

Pada saat BPK telah memberikan opini dalam bentuk WTP maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah ini telah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya serta dapat dibandingkan. Kualitas laporan keuangan yang baik tercermin dari semakin tingginya tingkat pengungkapan laporan keuangan. Jika tingkat pengungkapan tinggi maka probabilitas opini audit yang diperoleh pemerintah menjadi semakin baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemberian opini didasarkan pada kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Kualitas tentang audit yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan keuangan banyak dipertanyakan, seperti kasus pada Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas) mempertanyakan kualitas temuan dan standar yang digunakan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disampaikan menyusul dikeluarkannya laporan audit BPK terhadap SKK Migas tahun 2015 dengan hasil tidak wajar. Yang diduga terjadi inkonsistensi terhadap hasil akhir audit BPK. Pasalnya, materi yang menjadi temuan sama dengan temuan tahun-tahun sebelumnya, di mana hasil audit BPK menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian, ditambah lagi temuan-temuan tersebut sudah ditindaklanjuti, diberi jawaban dan klarifikasi.

Selain hal tersebut diatas yang menyangkut kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga ada pada persoalan antara pemberian opini dengan temuan penyalahgunaan anggaran, seperti pada kasus Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2011 yang mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), opini ini merupakan opini terbaik setelah WTP. Untuk opini WDP pada kemenpora ini dinilai bebas dari salah saji laporan keuangan meskipun ada ketidakwajaran dalam item tertentu, namun tidak memengaruhi kawajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Persoalan yang juga menjadi menarik bagi penulis adalah sinkronisasi hasil audit BPK dengan instansi pengakan hukum, terkait dengan hasil audit BPK dimana banyak kasus ketika BPK melakukan audit investigasi pada sebuah entitas tertentu dan BPK dari hasil investigasinya menyatakan terdapat pelanggaran aturan dan ditemui kerugian negara didalam pengerjaannya tapi hasil temuan tersebut terkadang diabaikan oleh penegak hukum, seperti yang diungkapkan oleh Anggota BPK, Ali Masykur Moesa bahwa 70 % hasil audit temuan BPK diabaikan oleh aparat penegak hokum dan hanya sebagian kecil yang diproses yaitu sebanyak 30%.

Dalam Kasus yang sebaliknya bahwa dalam upaya penegakan hukum seringhasil investigasi BPK yang menyatakan tidak terdapat pelanggaran aturan serta kerugian negara pada kasus tertentu namun tidak dijadikan acuan dalam penuntutan oleh Lembaga penegak hukum, seperti pada kasus Korupsi dana Haji Surya Darma Ali, dimana BPK menyatakan tidak menemukan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi dana haji 2010-2013 dan penyelewengan dana Operasional Menteri (DOM), namun itu tidak dipakai oleh pengadilan dan tetap menjerat yang bersangkutan.

Salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah adalah temuan audit. Hal ini pernah diteliti oleh Susanti et al (2016), Ditasari dan Sudrajat (2020), dan Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. temuan audit sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu sistem pengendalian intern dan ketidak patuhan terhadap perundang-undangan. Dalam penelitian kali ini akan membahas ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Variabel terakhir yaitu tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP). Hal ini pernah diteliti oleh Kurnia (2020), yang menyatakan bahwa TLHP berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. TLHP juga menjadi salah satu fokus dari setiap kepala daerah yang harus dijalankan oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia.

Oleh karena itu penelitian kali ini akan mencoba untuk meneliti bahwa karakteristik pemerintah daerah, temuan audit yang bersifat finansial dan juga tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat membentuk kinerja pemerintah daerah pemerintah kota/kabupaten

Sulawesi selatan pada tahun 2016-2018 dengan judul “Pengaruh Temuan Audit Bpk Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2018.

METODE PENELITIAN

Kategori penelitian

Kategori penelitian kali ini yaitu bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu metode analisi dengan angka yang dapat dihitung serta diukur. Analisi kuantitatif dimaksudkan untuk memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan satu atau beberapa kejadian lainnya, dengan menggunakan alat analisi statistik.

Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) serta laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota pada provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2016-2018. Data IHPS dan LKPD diperoleh melalui situs resmi BPK RI yaitu www.bpk.go.id.

Penelitian ini memiliki sampel sebanyak 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, yang mempunyai data yang diperlukan peneliti dalam jangka waktu 3 tahun (2016-2018). Sampel yang memenuhi kriteria yaitu:

1. Jumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan adalah 24.
2. Kabupaten/kota yang tidak memenuhi kriteria ada 4
3. Jumlah sampel yang digunakan 20
4. Total sampel dalam jangka waktu 3 tahun 60 sampel

Sampel yang tidak digunakan dalam penelitian ini yaitu kabupaten maros, kabupaten pinrang, dan kabupaten sinjai, karena dalam IHPS yang di terbitkan BPK tidak terdapat rekomendasi pada tahun 2018 untuk kabupatenmaros, pinrang dan soppeng, 2016 untuk kabupaten sinjai.

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik *nonprobability* sampling, yaitu dengan teknik *sampling purposive*. Teknik *nonprobability* adalah suatu Teknik pengambilan sampel yang tidak akan memberikan kesempatan bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 2017:84).

Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel utama yaitu variabel independen dan dependen. Adapun pengertian dan pengukuran masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah, dimana menurut Mahmudi. 2011: 170, mengungkapkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dana belanja dengan menggunakan system keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah penelitian ini menggunakan Efisiensi keuangan daerah, dimana:

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$RE - KAD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu karakteristik pemerintah, temuan audit, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dimana:

a. Temuan Audit

Temuan audit yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu ketidak patuhan terhadap perundang-undangan, dimana tidakpatuhan terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu, kerugian Negara, potensi kerugian Negara, kekurangan peerimaan Negara, dan administrasi. Dalam mengukur temuan audit dapat menggunakan jumlah dari temuan atas kasus ketidak patuhan pemerintah daerah terhadap peraruran perundang-undangan yang berlaku.

FIND : (LN) jumlah temuan audit

b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)

Masih rendahnya tindak lanjut rekomendasi yang menunjukkan belum optimalnya pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan atas temuan audit. Pemeriksaan oleh auditor pada umumnya menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dari pemerintah daerah tersebut.

$$\text{TIND} = \frac{\text{nilai sesuai rekomendasi}}{\text{nilai rekomendasi}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Descriptive statistics

Tabel 1

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Temuan Audit	60	17	27	21.49	1.499
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	60	15	23	20.58	1.695
Kinerja Pemerintah	60	80	99	90.48	5.245
Valid N (listwise)	60				

Sumber : olah data spss

Nilai pada variable temuan audit memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maximum 27 dan nilai rata-rata sebesar 21,49. Nilai standar deviasi sebesar 1,499 dimana lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada variable temuan audit memiliki hasil yang baik.

Nilai pada variable tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maximum 23 dan nilai rata-rata 20.58. Nilai standar deviasi sebesar 1,695 dimana lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada variable tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki hasil yang baik.

Nilai variable pada kinerja pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 80, nilai maximum 99 dan nilai rata-rata sebesar 90.48. nilai standar deviasi sebesar 5,245 dimana lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai pada variable kinerja pemerintah memiliki hasil yang baik.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Data

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		60	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	5.03883630	
Most Extreme Differences	Absolute	.070	
	Positive	.056	
	Negative	-.070	
Test Statistic		.070	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.667	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.654
		Upper Bound	.679

Sumber : hasil olah data spss

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa nilai Asymp.sig (2-tailed) adalah sebesar 0,654 yang menandakan data residual terdistribusi normal, karena probabilitas variable yaitu $0,654 > 0,05$ menandakan data residual terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolonieritas

Tabel 3

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(constant)		
Temuan	.510	1.961
Tlhp	.510	1.961

Sumber :hasil olah data spss

Berdasarkan table 3. Nilai tolerance yang dihasilkan sebesar 0,510 untuk seluruh variable yang telah diuji. Berdasarkan hasil tersebut nilai tolerance dapat disimpulkan tidak terdapat multikoleniaritas pada model yang digunakan dalam penelitian ini. Dan nilai VIF untuk setiap variable bebas (Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) sebesar 1.961 dimana lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa setiap variable bebas yang digunakan terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Hasil uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.674	5.551		
	Temuan Audit	.448	.354	.231	.632
				-0.482	.632
				1.266	.211

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	-.139	.313	-.081	-.445	.658
---------------------------------	-------	------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: Abs_RES
Sumber :hasil olah data spss

Berdasarkan table 4 dari hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan uji gletser,diketahui bahwa variable Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemerinsaan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

PENGUJIAN HIPOTESIS Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.278 ^a	.077	.045	5.126	1.424

a. Predictors: (Constant), tlp, temuan

b. Dependent Variable: kinerja

Sumber : hasil olah data spss

berdasarkan table 5 dari hasil uji Koefisien determinasi, dapat diketahui bahwa *Adjusted R Square* mempunyai nilai sebesar 0,045. Hal ini berarti presentase variable independent yaitu kinerja pemerintah yang mempunyai pengaruh terhadap variable dependen yaitu temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan hanya sebesar 4,5% yang berarti sisanya 95,5% dapat dijelaskan oleh variable lain selain variable penelitian.

Uji Statistik t

Tabel 6 Hasil Uji Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	96.857	9.791		9.893	<.001
	Temuan Audit	.851	.624	.243	1.364	.178
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	-1.198	.551	-.387	-2.173	.034

a. Dependent Variable: kinerja

Berdasarkan persamaan Regresi Linier Berganda dapat dilihat :

$$\text{Kinerja} = 96,857(\alpha) + 0,851(X1) - 1,198(X2) + \epsilon$$

Dimana nilai konstanta sebesar 98,857 yang artinya apabila variable bebas memiliki nilai yang tetap maka kinerja pemerintah sebesar 96,857 kali. Nilai koefisien pada temuan audit sebesar 0,851 yang artinya apabila temuan audit meningkat 1% maka kinerja pemerintah akan meningkat sebesar 85,1% dengan asumsi variable independent lainnya tetap. Nilai koefisien pada tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar -1,198 yang artinya apabila nilai tindak lanjut hasil pemeriksaan meningkat 1% maka kinerja pemeritah akan menurun sebesar 11%.

PEMBAHASAN

Pengaruh temuan audit bpk terhadap kinerja pemerintah

Pengujian Hipotesisi 1 dalam penelitian ini untuk variable temuan audit hasilnya menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung}, 1,364 < t_{tabel} 2,00030$ pada tingkat signifikansi 5% (0,05), maka dapat di simpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Susanti et al (2016), Ditasari dan Sudrajat (2020), dan Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Temuan audit BPK dapat ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan audit berkaitan dengan opini yang akan diberikan oleh BPK (Dasmar, Basri, Indrawati, 2020). Opini yang diberikan oleh BPK terbagi atas 4 kategori yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah

Pengujian Hipotesisi 2 dalam penelitian ini untuk variable tindak lanjut hasil pemeriksaan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} -2,173 < t_{tabel} 2,00030$ pada tingkat signifikansi 5% (0,05), maka dapat di simpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kurnia (2020) dan Hamzah, Mattulada, dan Ikbal (2019) yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pejabat yang diperiksa (Kurnia, 2020).

Tetapi hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Tjandrakirana et al (2019) yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada variable Temuan audit BPK hasil penelitian menunjukkan bahwa, Temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2016-2018.
2. Pada variable Tindak lanjut hasil pemeriksaan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2016-2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama. L.M. Samryn. (2014). Pengantar Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pres
- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. (2012). Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika Aditama.
- Alpi dan Ramadhan (2018), Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan Volume 2, Nomor 3, 2018. Hal. 103-114
- Amyulianthy, Anto, dan Budi (2020). Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit. Jurnal Penelitian Akuntansi Vol. 1, No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.19166/jpa.v1i1.2409>
- Andani, Sarwani, Respati (2019). The Effects Of The Characteristics Of Local Governments And Audit Opinions On The Performance Of Provincial Governments In Indonesia. Jurnal Akuntansi DOI: <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130> Vol. 9, No.2 2019 Hal: 111-130

- Ardianingsih, Arum. (2018). *Audit Laporan Keuangan*. Jakarta.
- Arens, A Alvin. (2014). *Auditing And Assurance Services*. Jakarta: Erlangga.
- Arifin, Anwar. (2007). *Public Relations* .Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Dasmar, Basri, dan Indrawati, (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Al Iqtishad*, Edisi 16, Vol. 2, Tahun 2020
- Ditasari dan Sudrajat (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *INVENTORY : Jurnal Akuntansi* Vol. 4 No. 2
- Halim, Abdul. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Hamzah, Mattulada, Ikbal (2019). Pengaruh Hasil Pengawasan Internal Dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Terhadap Kinerja Keuangan Skpd Di Kabupaten Tojo Una Una. *e Jurnal Katalogis*, Volume 6 Nomor 2 Februari 2018 hlm 41-52 ISSN: 2302-2019
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika
- Kurnia (2020). Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Revenue*, Vol. 01, No. 01, Juni, 2020 p-ISSN : 2723-6498 e-ISSN: 2723-6501 DOI Issue : 10.46306/rev.v1i1 Doi Artikel : 10.46306/rev.v1i1.11
- Masyitoh, wardhani, setyaningrum (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Pemerintah Daerah Tingkat li Tahun 2008-2010. *Conference: Simposium Nasional Akuntansi XVIII At: Universitas Sumatera Utara – Medan*. Volume: XVIII
- Robbins, Stephen, dan Mary Coulter. (2010). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Saidi, Djafar. (2014) .*Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo
- Siagian, F. T. (2011). Ownership Structure and Governance Implementation: Evidence from Indonesia. *International Journal of Business, Humanities and Technology*, 1, 187-202.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Susanti, amir, dan tiswiyanti. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Tahun 2010-2013). DOI: <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.9.2.111-130>
- Syafiie, Inu Kencana. (2013) *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tarigan, Anderiasta. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. IPDN PRESS. Jatinangor.
- Thoha, Miftah. (2012). *Birokrasi dan politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tugiman, Hiro. (2006). *Standar Profesional Audit Internal*. Jakarta: Kanisius
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah